

DAYA BELI SEBAGAI JANTUNG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

Sebuah Telaah Ekonomi, Manajemen Kebijakan Publik, dan Refleksi Alkitabiah

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

2026



ARTIKEL AKADEMIK

Daya Beli sebagai Jantung Pemulihan Ekonomi Indonesia



Konsumsi Rumah Tangga • Upah Riil • Inflasi • UMKM • Kesejahteraan



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudyc.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Abstrak

Pemulihan ekonomi tidak cukup dinilai dari pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan investasi, atau ekspansi produksi. Pemulihan menjadi bermakna ketika rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan konsumsi yang layak, membangun tabungan, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta memiliki keyakinan terhadap masa depan. Dalam konteks Indonesia, daya beli merupakan jantung yang menghubungkan pendapatan, pekerjaan, inflasi, produktivitas, perlindungan sosial, dan dinamika permintaan domestik. Makalah ini menganalisis daya beli sebagai mekanisme utama pemulihan ekonomi Indonesia dengan menggabungkan perspektif ekonomi makro, ekonomi rumah tangga, manajemen kebijakan publik, serta refleksi etika Kristen. Data resmi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat, tetapi kualitas pemulihan harus dibaca bersama indikator upah, ketenagakerjaan, inflasi, struktur konsumsi, serta ketahanan kelas menengah. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa kebijakan menjaga daya beli tidak boleh dipersempit menjadi subsidi jangka pendek, melainkan harus dibangun melalui pekerjaan berkualitas, upah riil yang meningkat, stabilitas harga kebutuhan pokok, produktivitas UMKM, sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran, akses layanan dasar, serta institusi pasar yang adil. Perspektif Alkitab memperkaya kerangka tersebut melalui prinsip martabat kerja, keadilan upah, kepedulian terhadap kelompok rentan, kejujuran dalam perdagangan, larangan eksploitasi, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Dengan demikian, pemulihan ekonomi yang berpusat pada daya beli merupakan agenda simultan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

Kata Kunci

daya beli; konsumsi rumah tangga; upah riil; inflasi; pemulihan ekonomi; pekerjaan berkualitas; perlindungan sosial; UMKM; keadilan ekonomi; etika Kristen; Alkitab; Indonesia

Ringkasan Indikator Kontekstual Indonesia

Indikator	Nilai	Makna bagi daya beli
Pertumbuhan ekonomi 2025	5,11%	Basis pertumbuhan tetap kuat, namun perlu diterjemahkan menjadi pendapatan rumah tangga.
Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026	5,61% y-on-y	Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama.
Inflasi Juli 2026	2,88% y-on-y	Inflasi relatif terkendali tetap perlu dilihat pada komoditas yang paling banyak dikonsumsi kelompok berpendapatan rendah.
TPT Mei 2026	4,65%	Penciptaan kerja perlu dinilai bukan hanya dari jumlah, tetapi juga kualitas dan produktivitas.

Rata-rata upah buruh Mei 2026	Rp3,39 juta/bulan	Upah nominal harus dibandingkan dengan biaya hidup dan inflasi untuk menilai daya beli riil.
-------------------------------	-------------------	--

Catatan: angka di atas digunakan sebagai konteks makro mutakhir dari publikasi BPS dan Bank Indonesia per Agustus 2026. Daya beli tidak identik dengan satu indikator tunggal; ia harus dibaca bersama pendapatan riil, harga, struktur pekerjaan, beban rumah tangga, akses layanan publik, dan ekspektasi konsumen.

1. Pendahuluan: Mengapa Daya Beli Harus Menjadi Titik Pusat Pemulihan

Bagian ini menempatkan pemulihan ekonomi sering dibicarakan melalui angka pertumbuhan agregat, padahal pengalaman ekonomi warga berlangsung di meja makan, pasar, sekolah, tempat kerja, dan rekening rumah tangga. Masalah utamanya muncul ketika pendapatan nominal tidak bergerak secepat biaya hidup, pertumbuhan makro dapat berjalan berdampingan dengan rasa tertekan pada tingkat keluarga. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menggeser fokus evaluasi dari sekadar output menuju kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi layak, menabung, dan berinvestasi pada masa depan. Dalam perspektif Alkitab, Yakobus 2:15-16 mengingatkan bahwa kepedulian yang berhenti pada kata-kata tanpa pemenuhan kebutuhan jasmani kehilangan makna praktisnya.

Secara konseptual, pemulihan ekonomi sering dibicarakan melalui angka pertumbuhan agregat, padahal pengalaman ekonomi warga berlangsung di meja makan, pasar, sekolah, tempat kerja, dan rekening rumah tangga. Gagasan ini penting karena ketika pendapatan nominal tidak bergerak secepat biaya hidup, pertumbuhan makro dapat berjalan berdampingan dengan rasa tertekan pada tingkat keluarga. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menggeser fokus evaluasi dari sekadar output menuju kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi layak, menabung, dan berinvestasi pada masa depan menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Yakobus 2:15-16 mengingatkan bahwa kepedulian yang berhenti pada kata-kata tanpa pemenuhan kebutuhan jasmani kehilangan makna praktisnya. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika pendapatan nominal tidak bergerak secepat biaya hidup, pertumbuhan makro dapat berjalan berdampingan dengan rasa tertekan pada tingkat keluarga, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati

merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menggeser fokus evaluasi dari sekadar output menuju kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi layak, menabung, dan berinvestasi pada masa depan karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Yakobus 2:15-16 mengingatkan bahwa kepedulian yang berhenti pada kata-kata tanpa pemenuhan kebutuhan jasmani kehilangan makna praktisnya memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, pemulihan ekonomi sering dibicarakan melalui angka pertumbuhan agregat, padahal pengalaman ekonomi warga berlangsung di meja makan, pasar, sekolah, tempat kerja, dan rekening rumah tangga harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika pendapatan nominal tidak bergerak secepat biaya hidup, pertumbuhan makro dapat berjalan berdampingan dengan rasa tertekan pada tingkat keluarga, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menggeser fokus evaluasi dari sekadar output menuju kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi layak, menabung, dan berinvestasi pada masa depan menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Yakobus 2:15-16 mengingatkan bahwa kepedulian yang berhenti pada kata-kata tanpa pemenuhan kebutuhan jasmani kehilangan makna praktisnya, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Pada 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, sedangkan triwulan I-2026 mencatat pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan resiliensi yang penting, tetapi pertanyaan kebijakan berikutnya ialah bagaimana pertumbuhan itu diterjemahkan menjadi konsumsi yang berkualitas dan kemampuan menabung rumah tangga.

Pemulihan ekonomi yang hanya menekankan angka agregat berisiko mengabaikan 'recovery gap': sektor tertentu pulih lebih cepat, wilayah tertentu menikmati investasi lebih besar, sedangkan rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan informal atau berupah rendah memerlukan waktu lebih panjang untuk memulihkan neraca keuangannya.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang pemulihan ekonomi sering dibicarakan melalui angka pertumbuhan agregat, padahal pengalaman ekonomi warga berlangsung di meja makan, pasar, sekolah, tempat kerja, dan rekening rumah tangga ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus

memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

2. Memahami Daya Beli: Konsep, Ukuran, dan Batasannya

Bagian ini menempatkan daya beli adalah kemampuan pendapatan yang tersedia untuk memperoleh barang dan jasa pada tingkat harga tertentu, sehingga secara analitis ia merupakan relasi antara pendapatan dan biaya hidup. Masalah utamanya muncul pengukuran yang hanya memakai inflasi rata-rata dapat menutupi perbedaan keranjang konsumsi antara kelompok miskin, rentan, kelas menengah, dan kelompok kaya. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan upah riil, pengeluaran per kapita, indeks harga kelompok kebutuhan, beban utang, tabungan, serta persepsi konsumen. Dalam perspektif Alkitab, Amsal 11:1 tentang neraca yang benar menyediakan metafora moral bagi pentingnya ukuran ekonomi yang jujur dan tidak menyesatkan.

Secara konseptual, daya beli adalah kemampuan pendapatan yang tersedia untuk memperoleh barang dan jasa pada tingkat harga tertentu, sehingga secara analitis ia merupakan relasi antara pendapatan dan biaya hidup. Gagasan ini penting karena pengukuran yang hanya memakai inflasi rata-rata dapat menutupi perbedaan keranjang konsumsi antara kelompok miskin, rentan, kelas menengah, dan kelompok kaya. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan upah riil, pengeluaran per kapita, indeks harga kelompok kebutuhan, beban utang, tabungan, serta persepsi konsumen menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Amsal 11:1 tentang neraca yang benar menyediakan metafora moral bagi pentingnya ukuran ekonomi yang jujur dan tidak menyesatkan. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika pengukuran yang hanya memakai inflasi rata-rata dapat menutupi perbedaan keranjang konsumsi antara kelompok miskin, rentan, kelas menengah, dan kelompok kaya, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan upah riil, pengeluaran per kapita, indeks harga kelompok kebutuhan, beban utang, tabungan, serta persepsi konsumen karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara

disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Amsal 11:1 tentang neraca yang benar menyediakan metafora moral bagi pentingnya ukuran ekonomi yang jujur dan tidak menyesatkan memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, daya beli adalah kemampuan pendapatan yang tersedia untuk memperoleh barang dan jasa pada tingkat harga tertentu, sehingga secara analitis ia merupakan relasi antara pendapatan dan biaya hidup harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika pengukuran yang hanya memakai inflasi rata-rata dapat menutupi perbedaan keranjang konsumsi antara kelompok miskin, rentan, kelas menengah, dan kelompok kaya, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan upah riil, pengeluaran per kapita, indeks harga kelompok kebutuhan, beban utang, tabungan, serta persepsi konsumen menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Amsal 11:1 tentang neraca yang benar menyediakan metafora moral bagi pentingnya ukuran ekonomi yang jujur dan tidak menyesatkan, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

3. Konsumsi Rumah Tangga sebagai Mesin Permintaan Domestik

Bagian ini menempatkan konsumsi rumah tangga memiliki bobot sangat besar dalam ekonomi Indonesia dan menjadi saluran utama yang menghubungkan pendapatan masyarakat dengan omzet usaha. Masalah utamanya muncul pelemahan konsumsi pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah cepat merambat ke perdagangan, jasa, transportasi, makanan-minuman, serta UMKM. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menjaga arus pendapatan rumah tangga agar multiplier permintaan bekerja dari pasar lokal menuju produksi dan kesempatan kerja. Dalam perspektif Alkitab, Kisah Para Rasul 4:34-35 menampilkan semangat komunitas yang memastikan kebutuhan nyata anggota tidak diabaikan.

Secara konseptual, konsumsi rumah tangga memiliki bobot sangat besar dalam ekonomi Indonesia dan menjadi saluran utama yang menghubungkan pendapatan masyarakat dengan omzet usaha. Gagasan ini penting karena pelemahan konsumsi pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah cepat merambat ke perdagangan, jasa, transportasi, makanan-minuman, serta UMKM. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi

harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menjaga arus pendapatan rumah tangga agar multiplier permintaan bekerja dari pasar lokal menuju produksi dan kesempatan kerja menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Kisah Para Rasul 4:34-35 menampilkan semangat komunitas yang memastikan kebutuhan nyata anggota tidak diabaikan. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika pelemahan konsumsi pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah cepat merambat ke perdagangan, jasa, transportasi, makanan-minuman, serta UMKM, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menjaga arus pendapatan rumah tangga agar multiplier permintaan bekerja dari pasar lokal menuju produksi dan kesempatan kerja karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Kisah Para Rasul 4:34-35 menampilkan semangat komunitas yang memastikan kebutuhan nyata anggota tidak diabaikan memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, konsumsi rumah tangga memiliki bobot sangat besar dalam ekonomi Indonesia dan menjadi saluran utama yang menghubungkan pendapatan masyarakat dengan omzet usaha harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika pelemahan konsumsi pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah cepat merambat ke perdagangan, jasa, transportasi, makanan-minuman, serta UMKM, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menjaga arus pendapatan rumah tangga agar multiplier permintaan bekerja dari pasar lokal menuju produksi dan kesempatan kerja menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Kisah Para Rasul 4:34-35 menampilkan semangat komunitas yang memastikan kebutuhan nyata anggota tidak diabaikan, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang konsumsi rumah tangga memiliki bobot sangat besar dalam ekonomi Indonesia dan menjadi saluran utama yang menghubungkan pendapatan masyarakat dengan omzet usaha ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

4. Pertumbuhan Ekonomi versus Kesejahteraan yang Dirasakan

Bagian ini menempatkan pertumbuhan PDB dapat meningkat karena investasi, ekspor, atau belanja pemerintah tanpa perbaikan yang sama besar pada pendapatan disposabel seluruh rumah tangga. Masalah utamanya muncul kesenjangan antara statistik makro dan persepsi publik muncul ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi, pekerjaan baru berproduktivitas rendah, atau biaya perumahan, pangan, pendidikan, dan kesehatan meningkat. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menilai pertumbuhan melalui kualitas distribusinya: siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang menerima kenaikan pendapatan, dan siapa yang menanggung kenaikan biaya. Dalam perspektif Alkitab, Mikha 6:8 menempatkan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati sebagai orientasi tindakan, termasuk dalam menilai keberhasilan institusi ekonomi.

Secara konseptual, pertumbuhan PDB dapat meningkat karena investasi, ekspor, atau belanja pemerintah tanpa perbaikan yang sama besar pada pendapatan disposabel seluruh rumah tangga. Gagasan ini penting karena kesenjangan antara statistik makro dan persepsi publik muncul ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi, pekerjaan baru berproduktivitas rendah, atau biaya perumahan, pangan, pendidikan, dan kesehatan meningkat. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menilai pertumbuhan melalui kualitas distribusinya: siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang menerima kenaikan pendapatan, dan siapa yang menanggung kenaikan biaya menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Mikha 6:8 menempatkan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati sebagai orientasi tindakan, termasuk dalam menilai keberhasilan institusi ekonomi. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika

kesenjangan antara statistik makro dan persepsi publik muncul ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi, pekerjaan baru berproduktivitas rendah, atau biaya perumahan, pangan, pendidikan, dan kesehatan meningkat, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menilai pertumbuhan melalui kualitas distribusinya: siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang menerima kenaikan pendapatan, dan siapa yang menanggung kenaikan biaya karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Mikha 6:8 menempatkan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati sebagai orientasi tindakan, termasuk dalam menilai keberhasilan institusi ekonomi memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, pertumbuhan PDB dapat meningkat karena investasi, ekspor, atau belanja pemerintah tanpa perbaikan yang sama besar pada pendapatan disposabel seluruh rumah tangga harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika kesenjangan antara statistik makro dan persepsi publik muncul ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi, pekerjaan baru berproduktivitas rendah, atau biaya perumahan, pangan, pendidikan, dan kesehatan meningkat, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menilai pertumbuhan melalui kualitas distribusinya: siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang menerima kenaikan pendapatan, dan siapa yang menanggung kenaikan biaya menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Mikha 6:8 menempatkan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati sebagai orientasi tindakan, termasuk dalam menilai keberhasilan institusi ekonomi, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

5. Inflasi, Harga Pangan, dan Erosi Pendapatan Riil

Bagian ini menempatkan inflasi yang terkendali secara nasional tetap dapat dirasakan berat bila kenaikan harga terkonsentrasi pada pangan, sewa, transportasi, pendidikan, atau komoditas lain dengan pangsa besar dalam anggaran keluarga. Masalah utamanya muncul rumah tangga berpendapatan rendah memiliki ruang substitusi yang lebih kecil sehingga guncangan harga kebutuhan dasar cepat menurunkan kualitas konsumsi. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah memadukan stabilisasi harga,

kelancaran distribusi, produktivitas pangan, cadangan, data rantai pasok, dan perlindungan sosial responsif. Dalam perspektif Alkitab, Kejadian 41 tentang pengelolaan tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kekurangan mengajarkan pentingnya cadangan, antisipasi, dan tata kelola pangan.

Secara konseptual, inflasi yang terkendali secara nasional tetap dapat dirasakan berat bila kenaikan harga terkonsentrasi pada pangan, sewa, transportasi, pendidikan, atau komoditas lain dengan pangsa besar dalam anggaran keluarga. Gagasan ini penting karena rumah tangga berpendapatan rendah memiliki ruang substitusi yang lebih kecil sehingga guncangan harga kebutuhan dasar cepat menurunkan kualitas konsumsi. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan memadukan stabilisasi harga, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, cadangan, data rantai pasok, dan perlindungan sosial responsif menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Kejadian 41 tentang pengelolaan tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kekurangan mengajarkan pentingnya cadangan, antisipasi, dan tata kelola pangan. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika rumah tangga berpendapatan rendah memiliki ruang substitusi yang lebih kecil sehingga guncangan harga kebutuhan dasar cepat menurunkan kualitas konsumsi, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan memadukan stabilisasi harga, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, cadangan, data rantai pasok, dan perlindungan sosial responsif karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Kejadian 41 tentang pengelolaan tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kekurangan mengajarkan pentingnya cadangan, antisipasi, dan tata kelola pangan memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, inflasi yang terkendali secara nasional tetap dapat dirasakan berat bila kenaikan harga terkonsentrasi pada pangan, sewa, transportasi, pendidikan, atau komoditas lain dengan pangsa besar dalam anggaran keluarga harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga,

perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika rumah tangga berpendapatan rendah memiliki ruang substitusi yang lebih kecil sehingga guncangan harga kebutuhan dasar cepat menurunkan kualitas konsumsi, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip memadukan stabilisasi harga, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, cadangan, data rantai pasok, dan perlindungan sosial responsif menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Kejadian 41 tentang pengelolaan tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kekurangan mengajarkan pentingnya cadangan, antisipasi, dan tata kelola pangan, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Pada Juli 2026 inflasi IHK Indonesia tercatat 2,88 persen secara tahunan. Secara makro angka ini relatif terkendali, tetapi analisis daya beli memerlukan pembacaan lebih rinci terhadap inflasi pangan dan harga jasa esensial karena struktur konsumsi rumah tangga tidak seragam.

Stabilisasi harga sebaiknya tidak hanya dilaksanakan ketika harga telah melonjak. Sistem peringatan dini berbasis produksi, cuaca, stok, distribusi, ongkos angkut, harga grosir, dan harga ritel memungkinkan intervensi yang lebih murah dan tepat waktu.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang inflasi yang terkendali secara nasional tetap dapat dirasakan berat bila kenaikan harga terkonsentrasi pada pangan, sewa, transportasi, pendidikan, atau komoditas lain dengan pangsa besar dalam anggaran keluarga ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

6. Pekerjaan Berkualitas sebagai Fondasi Daya Beli

Bagian ini menempatkan daya beli yang berkelanjutan bersumber terutama dari pekerjaan produktif, bukan dari transfer yang terus-menerus. Masalah utamanya muncul jumlah orang bekerja dapat meningkat tetapi kualitas pemulihan tetap rapuh bila jam kerja tidak memadai, produktivitas rendah, penghasilan tidak stabil, atau pekerja tidak terlindungi. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah mengarahkan kebijakan penciptaan kerja pada produktivitas, formalitas yang realistis, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan mobilitas keterampilan. Dalam perspektif Alkitab, Ulangan 24:14-15 menegaskan larangan menindas pekerja dan kewajiban membayar upah pada waktunya karena pekerja bergantung pada penghasilan tersebut.

Secara konseptual, daya beli yang berkelanjutan bersumber terutama dari pekerjaan produktif, bukan dari transfer yang terus-menerus. Gagasan ini penting karena jumlah orang bekerja dapat meningkat tetapi kualitas pemulihan tetap rapuh bila jam kerja tidak memadai, produktivitas rendah, penghasilan tidak

stabil, atau pekerja tidak terlindungi. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan mengarahkan kebijakan penciptaan kerja pada produktivitas, formalitas yang realistis, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan mobilitas keterampilan menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Ulangan 24:14-15 menegaskan larangan menindas pekerja dan kewajiban membayar upah pada waktunya karena pekerja bergantung pada penghasilan tersebut. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika jumlah orang bekerja dapat meningkat tetapi kualitas pemulihan tetap rapuh bila jam kerja tidak memadai, produktivitas rendah, penghasilan tidak stabil, atau pekerja tidak terlindungi, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan mengarahkan kebijakan penciptaan kerja pada produktivitas, formalitas yang realistis, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan mobilitas keterampilan karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Ulangan 24:14-15 menegaskan larangan menindas pekerja dan kewajiban membayar upah pada waktunya karena pekerja bergantung pada penghasilan tersebut memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, daya beli yang berkelanjutan bersumber terutama dari pekerjaan produktif, bukan dari transfer yang terus-menerus harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika jumlah orang bekerja dapat meningkat tetapi kualitas pemulihan tetap rapuh bila jam kerja tidak memadai, produktivitas rendah, penghasilan tidak stabil, atau pekerja tidak terlindungi, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip mengarahkan kebijakan penciptaan kerja pada produktivitas, formalitas yang realistis, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan mobilitas keterampilan menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya

bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Ulangan 24:14-15 menegaskan larangan menindas pekerja dan kewajiban membayar upah pada waktunya karena pekerja bergantung pada penghasilan tersebut, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Data Sakernas Mei 2026 menunjukkan 148,19 juta orang bekerja, dengan TPT sebesar 4,65 persen. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa tambahan kesempatan kerja menghasilkan jam kerja, keamanan pendapatan, perlindungan, dan prospek peningkatan keterampilan yang memadai.

Ekonomi yang menciptakan banyak pekerjaan dengan produktivitas rendah dapat menahan daya beli pada level subsisten. Karena itu strategi industrialisasi, hilirisasi, jasa modern, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan pembangunan wilayah harus dievaluasi dari kemampuan menciptakan occupational ladder.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

7. Upah Riil, Produktivitas, dan Martabat Pekerja

Bagian ini menempatkan kenaikan upah nominal baru memperkuat daya beli apabila melampaui atau setidaknya mengikuti perubahan biaya hidup. Masalah utamanya muncul kenaikan upah yang tidak ditopang produktivitas dapat menekan usaha, tetapi produktivitas yang meningkat tanpa pembagian manfaat kepada pekerja juga menciptakan ketegangan distributif. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah membangun kontrak sosial produktivitas: investasi teknologi, pelatihan, tata kelola, dan efisiensi harus menghasilkan ruang bagi kenaikan pendapatan pekerja. Dalam perspektif Alkitab, 1 Timotius 5:18 menyatakan bahwa pekerja patut mendapat upahnya, sebuah prinsip yang menghubungkan kerja dengan penghargaan yang layak.

Secara konseptual, kenaikan upah nominal baru memperkuat daya beli apabila melampaui atau setidaknya mengikuti perubahan biaya hidup. Gagasan ini penting karena kenaikan upah yang tidak ditopang produktivitas dapat menekan usaha, tetapi produktivitas yang meningkat tanpa pembagian manfaat kepada pekerja juga menciptakan ketegangan distributif. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan membangun kontrak sosial produktivitas: investasi teknologi, pelatihan, tata kelola, dan efisiensi harus menghasilkan ruang bagi kenaikan pendapatan pekerja menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, 1 Timotius 5:18 menyatakan bahwa pekerja patut mendapat upahnya, sebuah prinsip yang menghubungkan kerja dengan penghargaan yang layak. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika kenaikan upah yang tidak ditopang produktivitas dapat menekan usaha, tetapi produktivitas yang meningkat tanpa pembagian manfaat kepada pekerja juga menciptakan ketegangan distributif, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan membangun kontrak sosial produktivitas: investasi teknologi, pelatihan, tata kelola, dan efisiensi harus menghasilkan ruang bagi kenaikan pendapatan pekerja karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi 1 Timotius 5:18 menyatakan bahwa pekerja patut mendapat upahnya, sebuah prinsip yang menghubungkan kerja dengan penghargaan yang layak memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, kenaikan upah nominal baru memperkuat daya beli apabila melampaui atau setidaknya mengikuti perubahan biaya hidup harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika kenaikan upah yang tidak ditopang produktivitas dapat menekan usaha, tetapi produktivitas yang meningkat tanpa pembagian manfaat kepada pekerja juga menciptakan ketegangan distributif, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip membangun kontrak sosial produktivitas: investasi teknologi, pelatihan, tata kelola, dan efisiensi harus menghasilkan ruang bagi kenaikan pendapatan pekerja menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis 1 Timotius 5:18 menyatakan bahwa pekerja patut mendapat upahnya, sebuah prinsip yang menghubungkan kerja dengan penghargaan yang layak, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sekitar Rp3,39 juta per bulan. Angka nasional ini menyembunyikan variasi besar menurut wilayah, pendidikan, lapangan usaha, status formal-informal, dan gender. Analisis yang bermakna harus membandingkan upah dengan biaya hidup lokal.

Produktivitas adalah jembatan yang memungkinkan perusahaan membayar lebih tanpa kehilangan daya saing. Investasi mesin, digitalisasi, perbaikan proses, kesehatan pekerja, dan pelatihan harus dihubungkan dengan mekanisme pembagian manfaat produktivitas.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang kenaikan upah nominal baru memperkuat daya beli apabila melampaui atau setidaknya mengikuti perubahan biaya hidup ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

8. Kelas Menengah dan Kelompok Rentan: Penyangga Sekaligus Titik Rapuh

Bagian ini menempatkan kelas menengah berperan sebagai penopang konsumsi, tabungan, pendidikan, pembelian perumahan, serta basis permintaan bagi sektor jasa dan industri. Masalah utamanya muncul kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat turun kembali ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit, biaya sekolah, bencana, atau lonjakan harga. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah membangun kebijakan yang tidak hanya menolong kelompok miskin ekstrem tetapi juga memperkuat ketahanan kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Dalam perspektif Alkitab, Amsal 31:8-9 menyerukan pembelaan terhadap mereka yang lemah dan hak mereka yang berkekurangan, sebuah mandat untuk desain kebijakan yang tidak membiarkan kelompok rentan tidak terlihat.

Secara konseptual, kelas menengah berperan sebagai penopang konsumsi, tabungan, pendidikan, pembelian perumahan, serta basis permintaan bagi sektor jasa dan industri. Gagasan ini penting karena kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat turun kembali ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit, biaya sekolah, bencana, atau lonjakan harga. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan membangun kebijakan yang tidak hanya menolong kelompok miskin ekstrem tetapi juga memperkuat ketahanan kelompok rentan dan kelas menengah bawah menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Amsal 31:8-9 menyerukan pembelaan terhadap mereka yang lemah dan hak mereka yang berkekurangan, sebuah mandat untuk desain kebijakan yang tidak membiarkan kelompok rentan tidak terlihat. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika

kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat turun kembali ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit, biaya sekolah, bencana, atau lonjakan harga, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan membangun kebijakan yang tidak hanya menolong kelompok miskin ekstrem tetapi juga memperkuat ketahanan kelompok rentan dan kelas menengah bawah karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Amsal 31:8-9 menyerukan pembelaan terhadap mereka yang lemah dan hak mereka yang berkekurangan, sebuah mandat untuk desain kebijakan yang tidak membiarkan kelompok rentan tidak terlihat memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, kelas menengah berperan sebagai penopang konsumsi, tabungan, pendidikan, pembelian perumahan, serta basis permintaan bagi sektor jasa dan industri harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat turun kembali ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit, biaya sekolah, bencana, atau lonjakan harga, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip membangun kebijakan yang tidak hanya menolong kelompok miskin ekstrem tetapi juga memperkuat ketahanan kelompok rentan dan kelas menengah bawah menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Amsal 31:8-9 menyerukan pembelaan terhadap mereka yang lemah dan hak mereka yang berkekurangan, sebuah mandat untuk desain kebijakan yang tidak membiarkan kelompok rentan tidak terlihat, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

9. Perlindungan Sosial: Dari Bantuan Darurat menuju Tangga Mobilitas

Bagian ini menempatkan transfer tunai, subsidi tepat sasaran, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan program perlindungan sosial sangat penting saat rumah tangga terkena guncangan. Masalah utamanya muncul program yang tidak terintegrasi atau terlalu lama bersifat pasif dapat mengurangi efektivitas fiskal dan gagal membangun kapasitas produktif. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menghubungkan bantuan dengan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, pembiayaan mikro yang sehat, dan pendampingan usaha. Dalam perspektif Alkitab, Imam 19:9-10

mengenai bagian hasil panen yang dibiarkan bagi orang miskin dan pendatang menunjukkan prinsip penyediaan ruang ekonomi bagi yang rentan, bukan pengabaian.

Secara konseptual, transfer tunai, subsidi tepat sasaran, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan program perlindungan sosial sangat penting saat rumah tangga terkena guncangan. Gagasan ini penting karena program yang tidak terintegrasi atau terlalu lama bersifat pasif dapat mengurangi efektivitas fiskal dan gagal membangun kapasitas produktif. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menghubungkan bantuan dengan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, pembiayaan mikro yang sehat, dan pendampingan usaha menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Imamat 19:9-10 mengenai bagian hasil panen yang dibiarkan bagi orang miskin dan pendatang menunjukkan prinsip penyediaan ruang ekonomi bagi yang rentan, bukan pengabaian. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika program yang tidak terintegrasi atau terlalu lama bersifat pasif dapat mengurangi efektivitas fiskal dan gagal membangun kapasitas produktif, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menghubungkan bantuan dengan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, pembiayaan mikro yang sehat, dan pendampingan usaha karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Imamat 19:9-10 mengenai bagian hasil panen yang dibiarkan bagi orang miskin dan pendatang menunjukkan prinsip penyediaan ruang ekonomi bagi yang rentan, bukan pengabaian memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, transfer tunai, subsidi tepat sasaran, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan program perlindungan sosial sangat penting saat rumah tangga terkena guncangan harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas

pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika program yang tidak terintegrasi atau terlalu lama bersifat pasif dapat mengurangi efektivitas fiskal dan gagal membangun kapasitas produktif, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menghubungkan bantuan dengan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, pembiayaan mikro yang sehat, dan pendampingan usaha menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Imamat 19:9-10 mengenai bagian hasil panen yang dibiarkan bagi orang miskin dan pendatang menunjukkan prinsip penyediaan ruang ekonomi bagi yang rentan, bukan pengabaian, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang transfer tunai, subsidi tepat sasaran, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan program perlindungan sosial sangat penting saat rumah tangga terkena guncangan ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

10. UMKM, Pasar Lokal, dan Sirkulasi Pendapatan

Bagian ini menempatkan UMKM merupakan tempat bertemunya daya beli dan penciptaan pendapatan lokal; ketika konsumen menahan belanja, usaha kecil merasakan dampak lebih cepat daripada korporasi yang memiliki cadangan modal besar. Masalah utamanya muncul masalah utama UMKM bukan hanya akses kredit, tetapi juga pasar, produktivitas, mutu, digitalisasi, logistik, manajemen kas, dan kemampuan membaca permintaan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah memperkuat ekosistem permintaan lokal melalui pengadaan, kemitraan rantai pasok, digitalisasi yang inklusif, serta pembiayaan berdasarkan arus kas. Dalam perspektif Alkitab, Amsal 22:29 menghargai kecakapan dalam pekerjaan; relevansinya bagi UMKM adalah bahwa keberpihakan harus disertai peningkatan kompetensi dan mutu.

Secara konseptual, UMKM merupakan tempat bertemunya daya beli dan penciptaan pendapatan lokal; ketika konsumen menahan belanja, usaha kecil merasakan dampak lebih cepat daripada korporasi yang memiliki cadangan modal besar. Gagasan ini penting karena masalah utama UMKM bukan hanya akses kredit, tetapi juga pasar, produktivitas, mutu, digitalisasi, logistik, manajemen kas, dan kemampuan membaca permintaan. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah

keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan memperkuat ekosistem permintaan lokal melalui pengadaan, kemitraan rantai pasok, digitalisasi yang inklusif, serta pembiayaan berdasarkan arus kas menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Amsal 22:29 menghargai kecakapan dalam pekerjaan; relevansinya bagi UMKM adalah bahwa keberpihakan harus disertai peningkatan kompetensi dan mutu. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika masalah utama UMKM bukan hanya akses kredit, tetapi juga pasar, produktivitas, mutu, digitalisasi, logistik, manajemen kas, dan kemampuan membaca permintaan, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan memperkuat ekosistem permintaan lokal melalui pengadaan, kemitraan rantai pasok, digitalisasi yang inklusif, serta pembiayaan berdasarkan arus kas karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Amsal 22:29 menghargai kecakapan dalam pekerjaan; relevansinya bagi UMKM adalah bahwa keberpihakan harus disertai peningkatan kompetensi dan mutu memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, UMKM merupakan tempat bertemunya daya beli dan penciptaan pendapatan lokal; ketika konsumen menahan belanja, usaha kecil merasakan dampak lebih cepat daripada korporasi yang memiliki cadangan modal besar harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika masalah utama UMKM bukan hanya akses kredit, tetapi juga pasar, produktivitas, mutu, digitalisasi, logistik, manajemen kas, dan kemampuan membaca permintaan, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip memperkuat ekosistem permintaan lokal melalui pengadaan, kemitraan rantai pasok, digitalisasi yang inklusif, serta pembiayaan berdasarkan arus kas menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Amsal 22:29 menghargai kecakapan dalam pekerjaan; relevansinya bagi UMKM adalah bahwa keberpihakan harus disertai peningkatan kompetensi dan mutu,

yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

11. Pajak, Subsidi, dan Transfer: Menjaga Pendapatan Disposabel

Bagian ini menempatkan kebijakan fiskal memengaruhi daya beli melalui pajak, subsidi, belanja sosial, upah sektor publik, investasi infrastruktur, dan harga layanan yang diatur pemerintah. Masalah utamanya muncul subsidi yang terlalu luas dapat mahal dan dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan, sedangkan pengetatan yang tiba-tiba dapat menekan konsumsi dan ekspektasi rumah tangga. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menerapkan prinsip *targeted but simple*: sasaran jelas, administrasi mudah, data terintegrasi, mekanisme koreksi, dan komunikasi yang dapat dipercaya. Dalam perspektif Alkitab, Roma 13:6-7 menegaskan kewajiban dalam tatanan publik, sementara prinsip keadilan menuntut agar penerimaan publik dikelola untuk kebaikan bersama.

Secara konseptual, kebijakan fiskal memengaruhi daya beli melalui pajak, subsidi, belanja sosial, upah sektor publik, investasi infrastruktur, dan harga layanan yang diatur pemerintah. Gagasan ini penting karena subsidi yang terlalu luas dapat mahal dan dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan, sedangkan pengetatan yang tiba-tiba dapat menekan konsumsi dan ekspektasi rumah tangga. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menerapkan prinsip *targeted but simple*: sasaran jelas, administrasi mudah, data terintegrasi, mekanisme koreksi, dan komunikasi yang dapat dipercaya menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Roma 13:6-7 menegaskan kewajiban dalam tatanan publik, sementara prinsip keadilan menuntut agar penerimaan publik dikelola untuk kebaikan bersama. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika subsidi yang terlalu luas dapat mahal dan dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan, sedangkan pengetatan yang tiba-tiba dapat menekan konsumsi dan ekspektasi rumah tangga, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menerapkan prinsip *targeted but simple*: sasaran jelas, administrasi mudah, data terintegrasi, mekanisme koreksi, dan komunikasi yang dapat dipercaya karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin.

Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Roma 13:6-7 menegaskan kewajiban dalam tatanan publik, sementara prinsip keadilan menuntut agar penerimaan publik dikelola untuk kebaikan bersama memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, kebijakan fiskal memengaruhi daya beli melalui pajak, subsidi, belanja sosial, upah sektor publik, investasi infrastruktur, dan harga layanan yang diatur pemerintah harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika subsidi yang terlalu luas dapat mahal dan dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan, sedangkan pengetatan yang tiba-tiba dapat menekan konsumsi dan ekspektasi rumah tangga, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menerapkan prinsip *targeted but simple*: sasaran jelas, administrasi mudah, data terintegrasi, mekanisme koreksi, dan komunikasi yang dapat dipercaya menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Roma 13:6-7 menegaskan kewajiban dalam tatanan publik, sementara prinsip keadilan menuntut agar penerimaan publik dikelola untuk kebaikan bersama, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang kebijakan fiskal memengaruhi daya beli melalui pajak, subsidi, belanja sosial, upah sektor publik, investasi infrastruktur, dan harga layanan yang diatur pemerintah ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

12. Suku Bunga, Kredit Rumah Tangga, dan Daya Beli Masa Depan

Bagian ini menempatkan konsumsi hari ini sering dibiayai sebagian oleh kredit, sehingga suku bunga, tenor, akses pembiayaan, dan kualitas underwriting memengaruhi daya beli lintas waktu. Masalah utamanya muncul kredit produktif dan pembiayaan perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi utang konsumtif berbiaya tinggi dapat memindahkan daya beli masa depan ke masa kini dan menciptakan kerentanan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah memperkuat literasi keuangan, perlindungan konsumen, transparansi biaya, restrukturisasi yang sehat, dan pengawasan pinjaman digital.

Dalam perspektif Alkitab, Amsal 22:7 mengingatkan bahwa peminjam berada dalam posisi ketergantungan terhadap pemberi pinjaman, sehingga utang perlu dikelola dengan kehati-hatian.

Secara konseptual, konsumsi hari ini sering dibiayai sebagian oleh kredit, sehingga suku bunga, tenor, akses pembiayaan, dan kualitas underwriting memengaruhi daya beli lintas waktu. Gagasan ini penting karena kredit produktif dan pembiayaan perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi utang konsumtif berbiaya tinggi dapat memindahkan daya beli masa depan ke masa kini dan menciptakan kerentanan. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan memperkuat literasi keuangan, perlindungan konsumen, transparansi biaya, restrukturisasi yang sehat, dan pengawasan pinjaman digital menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Amsal 22:7 mengingatkan bahwa peminjam berada dalam posisi ketergantungan terhadap pemberi pinjaman, sehingga utang perlu dikelola dengan kehati-hatian. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika kredit produktif dan pembiayaan perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi utang konsumtif berbiaya tinggi dapat memindahkan daya beli masa depan ke masa kini dan menciptakan kerentanan, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan memperkuat literasi keuangan, perlindungan konsumen, transparansi biaya, restrukturisasi yang sehat, dan pengawasan pinjaman digital karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Amsal 22:7 mengingatkan bahwa peminjam berada dalam posisi ketergantungan terhadap pemberi pinjaman, sehingga utang perlu dikelola dengan kehati-hatian memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, konsumsi hari ini sering dibiayai sebagian oleh kredit, sehingga suku bunga, tenor, akses pembiayaan, dan kualitas underwriting memengaruhi daya beli lintas waktu harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas

pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika kredit produktif dan pembiayaan perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi utang konsumtif berbiaya tinggi dapat memindahkan daya beli masa depan ke masa kini dan menciptakan kerentanan, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip memperkuat literasi keuangan, perlindungan konsumen, transparansi biaya, restrukturisasi yang sehat, dan pengawasan pinjaman digital menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Amsal 22:7 mengingatkan bahwa peminjam berada dalam posisi ketergantungan terhadap pemberi pinjaman, sehingga utang perlu dikelola dengan kehati-hatian, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Suku bunga memengaruhi daya beli melalui cicilan rumah, kendaraan, modal kerja mikro, dan pinjaman konsumsi. Transmisi kebijakan moneter ke bunga kredit dapat berjalan dengan jeda, sehingga rumah tangga dapat merasakan beban pembiayaan lebih lama dibanding perubahan suku bunga kebijakan.

Ketersediaan kredit tidak selalu identik dengan inklusi yang sehat. Inklusi keuangan harus dinilai dari manfaat bersih setelah biaya, risiko gagal bayar, praktik penagihan, perlindungan data, dan kemampuan nasabah memahami kontrak.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

13. Digitalisasi Ekonomi dan Paradoks Daya Beli

Bagian ini menempatkan platform digital menurunkan biaya transaksi, memperluas pilihan, dan membuka pasar baru, tetapi juga dapat mendorong konsumsi impulsif, ketergantungan pada paylater, serta konsentrasi kekuatan pasar. Masalah utamanya muncul manfaat digital tidak otomatis inklusif ketika pelaku kecil menghadapi biaya komisi, ketergantungan algoritmik, kesenjangan data, dan kemampuan tawar yang lemah. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah mendesain transformasi digital yang meningkatkan produktivitas produsen kecil sekaligus melindungi konsumen dari manipulasi dan over-indebtedness. Dalam perspektif Alkitab, 1 Korintus 6:12 menekankan bahwa tidak semua yang diperbolehkan membawa manfaat dan manusia tidak boleh diperhamba oleh sesuatu; prinsip ini relevan bagi disiplin konsumsi digital.

Secara konseptual, platform digital menurunkan biaya transaksi, memperluas pilihan, dan membuka pasar baru, tetapi juga dapat mendorong konsumsi impulsif, ketergantungan pada paylater, serta konsentrasi kekuatan pasar. Gagasan ini penting karena manfaat digital tidak otomatis inklusif ketika pelaku kecil menghadapi biaya komisi, ketergantungan algoritmik, kesenjangan data, dan kemampuan tawar yang lemah. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan mendesain transformasi digital yang meningkatkan produktivitas produsen kecil sekaligus melindungi konsumen dari manipulasi dan

over-indebtedness menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, 1 Korintus 6:12 menekankan bahwa tidak semua yang diperbolehkan membawa manfaat dan manusia tidak boleh diperhamba oleh sesuatu; prinsip ini relevan bagi disiplin konsumsi digital. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika manfaat digital tidak otomatis inklusif ketika pelaku kecil menghadapi biaya komisi, ketergantungan algoritmik, kesenjangan data, dan kemampuan tawar yang lemah, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan mendesain transformasi digital yang meningkatkan produktivitas produsen kecil sekaligus melindungi konsumen dari manipulasi dan over-indebtedness karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi 1 Korintus 6:12 menekankan bahwa tidak semua yang diperbolehkan membawa manfaat dan manusia tidak boleh diperhamba oleh sesuatu; prinsip ini relevan bagi disiplin konsumsi digital memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, platform digital menurunkan biaya transaksi, memperluas pilihan, dan membuka pasar baru, tetapi juga dapat mendorong konsumsi impulsif, ketergantungan pada paylater, serta konsentrasi kekuatan pasar harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika manfaat digital tidak otomatis inklusif ketika pelaku kecil menghadapi biaya komisi, ketergantungan algoritmik, kesenjangan data, dan kemampuan tawar yang lemah, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip mendesain transformasi digital yang meningkatkan produktivitas produsen kecil sekaligus melindungi konsumen dari manipulasi dan over-indebtedness menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis 1 Korintus 6:12 menekankan bahwa tidak semua yang diperbolehkan membawa manfaat dan manusia tidak boleh diperhamba oleh sesuatu; prinsip ini relevan bagi disiplin konsumsi digital, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang platform digital menurunkan biaya transaksi, memperluas pilihan, dan membuka pasar baru, tetapi juga dapat mendorong konsumsi impulsif, ketergantungan pada paylater, serta konsentrasi kekuatan pasar ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

14. Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan sebagai Daya Beli yang Tersembunyi

Bagian ini menempatkan daya beli tidak hanya ditentukan oleh harga barang di pasar, tetapi juga oleh seberapa besar rumah tangga harus membayar sendiri untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Masalah utamanya muncul layanan publik yang berkualitas rendah memaksa rumah tangga membeli alternatif swasta sehingga pendapatan yang tampak cukup menjadi sempit setelah kebutuhan esensial dibayar. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah melihat layanan dasar sebagai social wage yang memperbesar pendapatan disposabel efektif tanpa harus selalu menaikkan pendapatan tunai. Dalam perspektif Alkitab, Matius 25:35-40 menempatkan pelayanan terhadap kebutuhan dasar sesama sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang sangat tinggi.

Secara konseptual, daya beli tidak hanya ditentukan oleh harga barang di pasar, tetapi juga oleh seberapa besar rumah tangga harus membayar sendiri untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Gagasan ini penting karena layanan publik yang berkualitas rendah memaksa rumah tangga membeli alternatif swasta sehingga pendapatan yang tampak cukup menjadi sempit setelah kebutuhan esensial dibayar. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan melihat layanan dasar sebagai social wage yang memperbesar pendapatan disposabel efektif tanpa harus selalu menaikkan pendapatan tunai menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Matius 25:35-40 menempatkan pelayanan terhadap kebutuhan dasar sesama sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika

layanan publik yang berkualitas rendah memaksa rumah tangga membeli alternatif swasta sehingga pendapatan yang tampak cukup menjadi sempit setelah kebutuhan esensial dibayar, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan melihat layanan dasar sebagai social wage yang memperbesar pendapatan disposabel efektif tanpa harus selalu menaikkan pendapatan tunai karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Matius 25:35-40 menempatkan pelayanan terhadap kebutuhan dasar sesama sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang sangat tinggi memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, daya beli tidak hanya ditentukan oleh harga barang di pasar, tetapi juga oleh seberapa besar rumah tangga harus membayar sendiri untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika layanan publik yang berkualitas rendah memaksa rumah tangga membeli alternatif swasta sehingga pendapatan yang tampak cukup menjadi sempit setelah kebutuhan esensial dibayar, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip melihat layanan dasar sebagai social wage yang memperbesar pendapatan disposabel efektif tanpa harus selalu menaikkan pendapatan tunai menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Matius 25:35-40 menempatkan pelayanan terhadap kebutuhan dasar sesama sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang sangat tinggi, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

15. Ketahanan Pangan dan Daya Beli Rumah Tangga

Bagian ini menempatkan pangan memiliki posisi khusus karena tidak dapat ditunda dan pangsanya besar pada pengeluaran kelompok miskin. Masalah utamanya muncul harga pangan dipengaruhi musim, iklim, produktivitas, logistik, struktur pasar, impor, cadangan, dan koordinasi pusat-daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah mengintegrasikan produksi, penyimpanan, transportasi, informasi harga, perlindungan petani, dan akses konsumen agar stabilitas harga tidak dibayar dengan kerugian

produsen. Dalam perspektif Alkitab, Amsal 12:11 menghubungkan ketekunan mengolah tanah dengan kecukupan makanan, menekankan nilai produktivitas riil dan kerja yang memberi hasil.

Secara konseptual, pangan memiliki posisi khusus karena tidak dapat ditunda dan pangsanya besar pada pengeluaran kelompok miskin. Gagasan ini penting karena harga pangan dipengaruhi musim, iklim, produktivitas, logistik, struktur pasar, impor, cadangan, dan koordinasi pusat-daerah. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan mengintegrasikan produksi, penyimpanan, transportasi, informasi harga, perlindungan petani, dan akses konsumen agar stabilitas harga tidak dibayar dengan kerugian produsen menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Amsal 12:11 menghubungkan ketekunan mengolah tanah dengan kecukupan makanan, menekankan nilai produktivitas riil dan kerja yang memberi hasil. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika harga pangan dipengaruhi musim, iklim, produktivitas, logistik, struktur pasar, impor, cadangan, dan koordinasi pusat-daerah, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan mengintegrasikan produksi, penyimpanan, transportasi, informasi harga, perlindungan petani, dan akses konsumen agar stabilitas harga tidak dibayar dengan kerugian produsen karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Amsal 12:11 menghubungkan ketekunan mengolah tanah dengan kecukupan makanan, menekankan nilai produktivitas riil dan kerja yang memberi hasil memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, pangan memiliki posisi khusus karena tidak dapat ditunda dan pangsanya besar pada pengeluaran kelompok miskin harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika harga pangan dipengaruhi musim, iklim, produktivitas, logistik, struktur pasar, impor, cadangan, dan koordinasi pusat-

daerah, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip mengintegrasikan produksi, penyimpanan, transportasi, informasi harga, perlindungan petani, dan akses konsumen agar stabilitas harga tidak dibayar dengan kerugian produsen menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Amsal 12:11 menghubungkan ketekunan mengolah tanah dengan kecukupan makanan, menekankan nilai produktivitas riil dan kerja yang memberi hasil, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang pangan memiliki posisi khusus karena tidak dapat ditunda dan pangsanya besar pada pengeluaran kelompok miskin ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

16. Dimensi Wilayah: Daya Beli Indonesia Tidak Seragam

Bagian ini menempatkan Indonesia adalah ekonomi kepulauan dengan biaya logistik, struktur pekerjaan, harga pangan, akses layanan, dan pendapatan yang berbeda tajam antarwilayah. Masalah utamanya muncul kebijakan nasional yang seragam dapat menghasilkan dampak berbeda karena struktur konsumsi masyarakat Jakarta, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan wilayah kepulauan kecil tidak sama. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah mengembangkan indikator biaya hidup wilayah, transfer fiskal yang sensitif kebutuhan, serta strategi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada keunggulan setempat. Dalam perspektif Alkitab, 1 Korintus 12:14-26 menggambarkan satu tubuh dengan banyak anggota; analoginya bagi negara kepulauan adalah bahwa kemajuan nasional memerlukan perhatian pada setiap wilayah.

Secara konseptual, Indonesia adalah ekonomi kepulauan dengan biaya logistik, struktur pekerjaan, harga pangan, akses layanan, dan pendapatan yang berbeda tajam antarwilayah. Gagasan ini penting karena kebijakan nasional yang seragam dapat menghasilkan dampak berbeda karena struktur konsumsi masyarakat Jakarta, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan wilayah kepulauan kecil tidak sama. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan mengembangkan indikator biaya hidup wilayah,

transfer fiskal yang sensitif kebutuhan, serta strategi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada keunggulan setempat menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, 1 Korintus 12:14-26 menggambarkan satu tubuh dengan banyak anggota; analoginya bagi negara kepulauan adalah bahwa kemajuan nasional memerlukan perhatian pada setiap wilayah. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika kebijakan nasional yang seragam dapat menghasilkan dampak berbeda karena struktur konsumsi masyarakat Jakarta, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan wilayah kepulauan kecil tidak sama, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan mengembangkan indikator biaya hidup wilayah, transfer fiskal yang sensitif kebutuhan, serta strategi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada keunggulan setempat karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi 1 Korintus 12:14-26 menggambarkan satu tubuh dengan banyak anggota; analoginya bagi negara kepulauan adalah bahwa kemajuan nasional memerlukan perhatian pada setiap wilayah memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, Indonesia adalah ekonomi kepulauan dengan biaya logistik, struktur pekerjaan, harga pangan, akses layanan, dan pendapatan yang berbeda tajam antarwilayah harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika kebijakan nasional yang seragam dapat menghasilkan dampak berbeda karena struktur konsumsi masyarakat Jakarta, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan wilayah kepulauan kecil tidak sama, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip mengembangkan indikator biaya hidup wilayah, transfer fiskal yang sensitif kebutuhan, serta strategi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada keunggulan setempat menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis 1 Korintus 12:14-26 menggambarkan satu tubuh dengan banyak anggota; analoginya bagi negara kepulauan adalah bahwa kemajuan nasional memerlukan perhatian pada setiap wilayah, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

17. Etika Pasar: Harga, Persaingan, dan Kejujuran

Bagian ini menempatkan pasar yang sehat memerlukan kompetisi, informasi, kontrak yang dapat ditegakkan, standar mutu, dan larangan praktik manipulatif. Masalah utamanya muncul daya beli masyarakat dapat terkikis bukan hanya oleh inflasi makro, tetapi juga oleh kartel, biaya tersembunyi, praktik monopsoni, informasi asimetris, dan penipuan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah memperkuat penegakan persaingan, perlindungan konsumen, transparansi harga, standar digital, dan integritas pelaku usaha. Dalam perspektif Alkitab, Imamat 19:35-36 melarang kecurangan dalam ukuran dan timbangan, suatu prinsip yang sangat langsung bagi etika perdagangan dan perlindungan konsumen.

Secara konseptual, pasar yang sehat memerlukan kompetisi, informasi, kontrak yang dapat ditegakkan, standar mutu, dan larangan praktik manipulatif. Gagasan ini penting karena daya beli masyarakat dapat terkikis bukan hanya oleh inflasi makro, tetapi juga oleh kartel, biaya tersembunyi, praktik monopsoni, informasi asimetris, dan penipuan. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan memperkuat penegakan persaingan, perlindungan konsumen, transparansi harga, standar digital, dan integritas pelaku usaha menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Imamat 19:35-36 melarang kecurangan dalam ukuran dan timbangan, suatu prinsip yang sangat langsung bagi etika perdagangan dan perlindungan konsumen. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika daya beli masyarakat dapat terkikis bukan hanya oleh inflasi makro, tetapi juga oleh kartel, biaya tersembunyi, praktik monopsoni, informasi asimetris, dan penipuan, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan memperkuat penegakan persaingan, perlindungan konsumen, transparansi harga, standar digital, dan integritas pelaku usaha karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Imamat 19:35-36 melarang kecurangan

dalam ukuran dan timbangan, suatu prinsip yang sangat langsung bagi etika perdagangan dan perlindungan konsumen memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, pasar yang sehat memerlukan kompetisi, informasi, kontrak yang dapat ditegakkan, standar mutu, dan larangan praktik manipulatif harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika daya beli masyarakat dapat terkikis bukan hanya oleh inflasi makro, tetapi juga oleh kartel, biaya tersembunyi, praktik monopsoni, informasi asimetris, dan penipuan, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip memperkuat penegakan persaingan, perlindungan konsumen, transparansi harga, standar digital, dan integritas pelaku usaha menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Imamat 19:35-36 melarang kecurangan dalam ukuran dan timbangan, suatu prinsip yang sangat langsung bagi etika perdagangan dan perlindungan konsumen, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang pasar yang sehat memerlukan kompetisi, informasi, kontrak yang dapat ditegakkan, standar mutu, dan larangan praktik manipulatif ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

18. Kebijakan Daya Beli dalam Perspektif Manajemen Strategis

Bagian ini menempatkan menjaga daya beli merupakan masalah lintas kementerian yang menyentuh fiskal, moneter, perdagangan, tenaga kerja, pangan, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemerintah daerah. Masalah utamanya muncul fragmentasi kebijakan menciptakan situasi ketika satu program menaikkan pendapatan tetapi program lain menaikkan biaya atau mengurangi akses. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah membangun dashboard nasional daya beli, mekanisme early warning, koordinasi lintas lembaga, evaluasi dampak distribusi, serta penganggaran berbasis hasil. Dalam perspektif Alkitab, Lukas 14:28 mengajarkan pentingnya menghitung biaya sebelum membangun, sebuah prinsip manajemen yang relevan bagi perencanaan kebijakan publik.

Secara konseptual, menjaga daya beli merupakan masalah lintas kementerian yang menyentuh fiskal, moneter, perdagangan, tenaga kerja, pangan, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemerintah daerah. Gagasan ini penting karena fragmentasi kebijakan menciptakan situasi ketika satu program

menaikkan pendapatan tetapi program lain menaikkan biaya atau mengurangi akses. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan membangun dashboard nasional daya beli, mekanisme early warning, koordinasi lintas lembaga, evaluasi dampak distribusi, serta penganggaran berbasis hasil menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Lukas 14:28 mengajarkan pentingnya menghitung biaya sebelum membangun, sebuah prinsip manajemen yang relevan bagi perencanaan kebijakan publik. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika fragmentasi kebijakan menciptakan situasi ketika satu program menaikkan pendapatan tetapi program lain menaikkan biaya atau mengurangi akses, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan membangun dashboard nasional daya beli, mekanisme early warning, koordinasi lintas lembaga, evaluasi dampak distribusi, serta penganggaran berbasis hasil karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Lukas 14:28 mengajarkan pentingnya menghitung biaya sebelum membangun, sebuah prinsip manajemen yang relevan bagi perencanaan kebijakan publik memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, menjaga daya beli merupakan masalah lintas kementerian yang menyentuh fiskal, moneter, perdagangan, tenaga kerja, pangan, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemerintah daerah harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika fragmentasi kebijakan menciptakan situasi ketika satu program menaikkan pendapatan tetapi program lain menaikkan biaya atau mengurangi akses, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip membangun dashboard nasional daya beli, mekanisme early warning, koordinasi lintas lembaga, evaluasi dampak distribusi, serta penganggaran berbasis hasil menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan

kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Lukas 14:28 mengajarkan pentingnya menghitung biaya sebelum membangun, sebuah prinsip manajemen yang relevan bagi perencanaan kebijakan publik, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Dashboard daya beli nasional dapat memuat indikator headline dan indikator distribusional: inflasi kelompok makanan, upah riil, indeks penjualan eceran, keyakinan konsumen, rasio cicilan, kemiskinan rentan, konsumsi listrik rumah tangga, serta indikator regional. Tujuannya bukan menambah birokrasi, tetapi mempercepat keputusan.

Setiap kebijakan besar yang mengubah pajak, subsidi, tarif, harga energi, atau aturan ketenagakerjaan idealnya disertai distributional impact assessment sehingga dampaknya terhadap kelompok pendapatan dan wilayah dapat dipahami sebelum implementasi.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

19. Kerangka Kebijakan Terpadu: Dari Stabilitas menuju Mobilitas

Bagian ini menempatkan pemulihan yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi kebijakan yang menjaga konsumsi saat krisis sekaligus memperbesar kapasitas produktif setelah krisis. Masalah utamanya muncul terlalu fokus pada stimulus dapat menimbulkan beban fiskal, sedangkan terlalu cepat melakukan konsolidasi dapat melemahkan permintaan dan memperlambat penciptaan kerja. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menggunakan urutan kebijakan: lindungi, pulihkan, produktifkan, naikan kelas, dan bangun ketahanan. Dalam perspektif Alkitab, Pengkhotbah 3:1 mengingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, relevan bagi sequencing kebijakan antara ekspansi, normalisasi, dan reformasi struktural.

Secara konseptual, pemulihan yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi kebijakan yang menjaga konsumsi saat krisis sekaligus memperbesar kapasitas produktif setelah krisis. Gagasan ini penting karena terlalu fokus pada stimulus dapat menimbulkan beban fiskal, sedangkan terlalu cepat melakukan konsolidasi dapat melemahkan permintaan dan memperlambat penciptaan kerja. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menggunakan urutan kebijakan: lindungi, pulihkan, produktifkan, naikan kelas, dan bangun ketahanan menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Pengkhotbah 3:1 mengingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, relevan bagi sequencing kebijakan antara ekspansi, normalisasi, dan reformasi struktural. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika terlalu fokus pada stimulus dapat menimbulkan beban fiskal, sedangkan terlalu cepat melakukan konsolidasi dapat melemahkan permintaan dan memperlambat penciptaan kerja, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menggunakan urutan kebijakan: lindungi, pulihkan, produktifkan, naikan kelas, dan bangun ketahanan karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Pengkhotbah 3:1 mengingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, relevan bagi sequencing kebijakan antara ekspansi, normalisasi, dan reformasi struktural memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, pemulihan yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi kebijakan yang menjaga konsumsi saat krisis sekaligus memperbesar kapasitas produktif setelah krisis harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika terlalu fokus pada stimulus dapat menimbulkan beban fiskal, sedangkan terlalu cepat melakukan konsolidasi dapat melemahkan permintaan dan memperlambat penciptaan kerja, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menggunakan urutan kebijakan: lindungi, pulihkan, produktifkan, naikan kelas, dan bangun ketahanan menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Pengkhotbah 3:1 mengingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, relevan bagi sequencing kebijakan antara ekspansi, normalisasi, dan reformasi struktural, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

Kerangka 'Lindungi–Pulihkan–Produktifkan–Naikkan Kelas–Tanggguhkan Risiko' dapat dipakai sebagai urutan manajemen. Lindungi berarti mencegah jatuhnya konsumsi dasar; pulihkan berarti mengembalikan aktivitas; produktifkan berarti menaikkan output per pekerja; naikan kelas berarti memperluas mobilitas; dan tangguhkan risiko berarti membangun tabungan, asuransi, serta stabilisator otomatis.

Ruang fiskal yang terbatas mengharuskan prioritas. Program yang memiliki efek tinggi terhadap daya beli sekaligus produktivitas—misalnya gizi, kesehatan primer, pendidikan dasar berkualitas, transportasi publik, pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan dukungan UMKM berbasis pasar—memiliki nilai strategis ganda.

Implikasi bagi kebijakan dan manajemen

Implikasi praktis dari bagian ini adalah perlunya menerjemahkan gagasan tentang pemulihan yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi kebijakan yang menjaga konsumsi saat krisis sekaligus memperbesar kapasitas produktif setelah krisis ke dalam keputusan yang dapat diukur. Pertama, setiap kebijakan perlu mempunyai indikator hasil pada tingkat rumah tangga, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membedakan kebijakan universal, kebijakan terarah, dan kebijakan berbasis wilayah. Ketiga, evaluasi harus memperhatikan dampak tidak langsung, termasuk perubahan harga, insentif kerja, respons perusahaan, serta beban fiskal. Keempat, komunikasi publik harus menjelaskan tujuan, sasaran, jangka waktu, dan kriteria penghentian program. Dengan demikian, kebijakan daya beli berkembang dari respons ad hoc menjadi sistem manajemen ekonomi yang adaptif dan akuntabel.

20. Kesimpulan: Daya Beli sebagai Indikator Ekonomi yang Berwajah Manusia

Bagian ini menempatkan daya beli menyatukan pertanyaan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan: apakah pekerjaan cukup, harga terjangkau, pendapatan stabil, kebutuhan dasar terpenuhi, dan masa depan dapat direncanakan. Masalah utamanya muncul ekonomi yang tumbuh tanpa perluasan kemampuan rumah tangga pada akhirnya rapuh karena basis permintaan, kepercayaan, dan legitimasi sosial menjadi lemah. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dibahas adalah menjadikan daya beli sebagai indikator lintas kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan, produktivitas, pemerataan, dan kualitas layanan publik. Dalam perspektif Alkitab, Yohanes 10:10 tentang hidup yang berkelimpahan dapat dibaca sebagai panggilan etis agar pembangunan tidak berhenti pada akumulasi, melainkan memperluas kehidupan yang bermartabat.

Secara konseptual, daya beli menyatukan pertanyaan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan: apakah pekerjaan cukup, harga terjangkau, pendapatan stabil, kebutuhan dasar terpenuhi, dan masa depan dapat direncanakan. Gagasan ini penting karena ekonomi yang tumbuh tanpa perluasan kemampuan rumah tangga pada akhirnya rapuh karena basis permintaan, kepercayaan, dan legitimasi sosial menjadi lemah. Dalam analisis ekonomi, daya beli bukanlah sinonim dari konsumsi semata. Ia merekam kemampuan nyata rumah tangga untuk mengubah pendapatan nominal menjadi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, mobilitas, komunikasi, rekreasi yang wajar, dan tabungan. Karena itu, indikator daya beli selalu mempunyai dimensi harga, pendapatan, distribusi, dan ketidakpastian. Sebuah keluarga mungkin mencatat pendapatan nominal yang meningkat, tetapi jika harga kebutuhan esensial naik lebih cepat, biaya transportasi membesar, atau cicilan menghabiskan bagian lebih besar dari pendapatan, ruang ekonominya justru menyempit. Di sinilah pendekatan menjadikan daya beli sebagai indikator lintas kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan, produktivitas, pemerataan, dan kualitas layanan publik menjadi relevan. Kebijakan yang tampak berhasil pada agregat harus diuji kembali pada neraca rumah tangga: berapa rupiah yang tersisa setelah kebutuhan wajib, seberapa besar kemampuan menghadapi guncangan, dan apakah keluarga masih dapat berinvestasi pada masa depan anak-anaknya. Dari sisi etika, Yohanes 10:10 tentang hidup yang berkelimpahan dapat dibaca sebagai panggilan etis agar pembangunan tidak berhenti pada akumulasi, melainkan memperluas kehidupan yang bermartabat. Prinsip ini menggeser perhatian dari angka yang abstrak kepada manusia yang mengalami langsung konsekuensi keputusan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, isu ini memperoleh bobot khusus karena struktur ekonomi domestik sangat bergantung pada aktivitas rumah tangga dan jaringan usaha yang melayani konsumsi harian. Ketika ekonomi yang tumbuh tanpa perluasan kemampuan rumah tangga pada akhirnya rapuh karena basis permintaan, kepercayaan, dan legitimasi sosial menjadi lemah, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga. Pedagang kehilangan omzet, usaha makanan mengurangi pembelian bahan baku, jasa transportasi mengalami penurunan permintaan, produsen menahan ekspansi, dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati merekrut pekerja. Dengan demikian, daya beli membentuk lingkaran umpan balik antara konsumsi, pendapatan usaha, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Kebijakan menjadikan daya beli sebagai indikator lintas kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan, produktivitas, pemerataan, dan kualitas layanan publik karena itu harus dilihat sebagai investasi pada stabilitas sistem ekonomi, bukan semata-mata bantuan kepada konsumen. Namun, intervensi perlu dirancang secara disiplin. Menahan harga dengan cara yang merusak produsen akan mengurangi pasokan di masa depan; menaikkan pendapatan tanpa produktivitas dapat memicu tekanan biaya; dan subsidi yang salah sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi pusat kebijakan. Refleksi Yohanes 10:10 tentang hidup yang berkelimpahan dapat dibaca sebagai panggilan etis agar pembangunan tidak berhenti pada akumulasi, melainkan memperluas kehidupan yang bermartabat memperkuat tuntutan agar keseimbangan tersebut selalu mempertimbangkan mereka yang memiliki daya tawar paling lemah.

Dari perspektif manajemen publik, daya beli menyatukan pertanyaan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan: apakah pekerjaan cukup, harga terjangkau, pendapatan stabil, kebutuhan dasar terpenuhi, dan masa depan dapat direncanakan harus diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator, pemilik proses, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pemerintah memerlukan lebih dari satu angka inflasi atau satu angka pertumbuhan konsumsi. Sistem pemantauan sebaiknya membaca distribusi perubahan harga, perkembangan upah riil, proporsi pengeluaran makanan, penjualan eceran, tunggakan kredit, penggunaan bantuan sosial, mobilitas pekerjaan, dan ekspektasi rumah tangga. Ketika ekonomi yang tumbuh tanpa perluasan kemampuan rumah tangga pada akhirnya rapuh karena basis permintaan, kepercayaan, dan legitimasi sosial menjadi lemah, sinyal-sinyal tersebut dapat memberi peringatan lebih cepat daripada PDB yang diterbitkan secara periodik. Prinsip menjadikan daya beli sebagai indikator lintas kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan, produktivitas, pemerataan, dan kualitas layanan publik menuntut integrasi data antarlembaga serta kemampuan melakukan simulasi dampak kebijakan terhadap desil pendapatan dan wilayah. Dengan kerangka ini, keputusan tidak hanya bertanya 'berapa besar anggaran yang dibelanjakan', tetapi 'berapa besar kemampuan ekonomi rumah tangga yang dipulihkan'. Pendekatan tersebut sesuai dengan orientasi etis Yohanes 10:10 tentang hidup yang berkelimpahan dapat dibaca sebagai panggilan etis agar pembangunan tidak berhenti pada akumulasi, melainkan memperluas kehidupan yang bermartabat, yaitu melihat kebijakan melalui konsekuensinya bagi kehidupan konkret dan bukan melalui kepuasan administratif semata.

21. Sintesis Teologis: Ekonomi sebagai Ruang Tanggung Jawab Moral

Alkitab bukan buku teks ekonomi modern, dan karena itu tidak tepat memaksakan model fiskal, moneter, atau industrial tertentu seolah-olah merupakan satu-satunya model yang alkitabiah. Namun Alkitab menyediakan prinsip moral yang kuat untuk menilai tindakan ekonomi: martabat manusia, keadilan, kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, tanggung jawab atas kepemilikan, penghargaan terhadap kerja, larangan eksploitasi, kemurahan hati, dan penatalayanan. Prinsip-prinsip ini membentuk pertanyaan etis bagi kebijakan daya beli. Apakah pertumbuhan meningkatkan kemampuan keluarga

memenuhi kebutuhan? Apakah pekerja menerima kompensasi yang wajar? Apakah harga dibentuk melalui transaksi yang jujur? Apakah kelompok miskin memperoleh perlindungan ketika terkena guncangan? Apakah orang yang menerima bantuan memperoleh jalan menuju kemandirian?

Ulangan 24:14-15 mempunyai relevansi khusus bagi ekonomi upah. Teks tersebut menolak penindasan terhadap pekerja yang miskin dan memerintahkan pembayaran upah tepat waktu karena pekerja menaruh hidupnya pada penghasilan itu. Dalam bahasa ekonomi kontemporer, prinsip tersebut menyentuh cash-flow rumah tangga. Keterlambatan upah bukan sekadar pelanggaran administrasi; bagi pekerja yang tidak memiliki tabungan, keterlambatan dapat berarti utang baru, biaya keterlambatan sekolah, pengurangan gizi, atau ketidakmampuan membeli obat. Karena itu perlindungan upah, kepastian pembayaran, dan penegakan kontrak kerja merupakan bagian dari kebijakan daya beli.

Imamat 19:35-36 menolak timbangan dan ukuran yang curang. Pada ekonomi modern, prinsip ini dapat diperluas ke transparansi harga, label produk, kualitas barang, biaya pinjaman, algoritma harga, biaya platform, dan kontrak digital. Konsumen tidak benar-benar memiliki daya beli jika ia terus kehilangan nilai melalui informasi yang sengaja dibuat tidak transparan. Perlindungan konsumen dengan demikian bukan penghalang pasar, melainkan syarat agar pertukaran berlangsung secara adil dan kepercayaan dapat dipertahankan.

Kisah Yusuf dalam Kejadian 41 juga menawarkan pelajaran manajemen yang penting. Kelimpahan tidak dihabiskan seluruhnya; sebagian disimpan untuk menghadapi masa kekurangan. Dalam kebijakan modern, prinsip ini beresonansi dengan cadangan pangan, dana kontinjensi, stabilisator fiskal, asuransi sosial, dan manajemen risiko. Bagi rumah tangga, prinsip yang sama hadir dalam tabungan darurat. Daya beli yang kuat bukan berarti seluruh pendapatan dikonsumsi, tetapi kemampuan membagi pendapatan antara konsumsi sekarang, kewajiban, perlindungan risiko, dan kebutuhan masa depan.

Yakobus 5:4 menyampaikan kritik keras terhadap upah pekerja yang ditahan. Pesannya menegaskan bahwa ketidakadilan ekonomi mempunyai dimensi moral, bukan sekadar teknis. Pada saat yang sama, 2 Tesalonika 3:10 menekankan nilai tanggung jawab dan kerja. Kedua teks ini tidak harus dipertentangkan. Kebijakan sosial yang baik melindungi orang yang tidak mampu atau terkena guncangan, sekaligus membangun kemampuan bagi mereka yang dapat bekerja. Model terbaik bukan welfare tanpa mobilitas maupun pasar tanpa perlindungan, melainkan sistem yang menggabungkan safety net dengan opportunity ladder.

Matius 25:35-40 menempatkan kebutuhan dasar—makanan, minuman, pakaian, penerimaan terhadap orang asing, perawatan orang sakit—dalam pusat tanggung jawab moral. Dalam kerangka kebijakan, ayat ini dapat menginspirasi perhatian terhadap outcomes yang sangat konkret: kecukupan pangan, akses air, perumahan yang layak, layanan kesehatan, dan inklusi sosial. Daya beli menjadi salah satu mekanisme agar rumah tangga memiliki agensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara bermartabat, sementara layanan publik dan solidaritas sosial melengkapi kemampuan pasar ketika pendapatan tidak cukup.

Akhirnya, perspektif Kristen menolak dua reduksionisme. Pertama, manusia tidak boleh direduksi menjadi konsumen; nilai manusia tidak ditentukan oleh jumlah barang yang dapat dibeli. Kedua, kebutuhan material juga tidak boleh diremehkan atas nama spiritualitas. Tubuh, keluarga, kerja, komunitas, dan kebutuhan sehari-hari merupakan bagian nyata dari kehidupan manusia. Karena itu perhatian pada daya beli bukan pemujaan terhadap konsumsi, melainkan upaya memastikan bahwa sistem ekonomi memberi ruang bagi kehidupan yang layak, tanggung jawab, pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

22. Agenda Kebijakan Prioritas 2026–2030

Menjaga inflasi kebutuhan dasar. Koordinasi pangan, energi, logistik, data stok, dan pengawasan pasar harus difokuskan pada komoditas yang paling menentukan pengeluaran kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Menaikkan pendapatan riil melalui pekerjaan produktif. Kebijakan investasi perlu diberi KPI penciptaan kerja, kualitas upah, transfer keterampilan, dan linkage dengan pemasok domestik.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Memperkuat kelas menengah. Kebijakan perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan dari guncangan perlu dirancang agar keluarga tidak jatuh kembali ke kerentanan.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Membangun perlindungan sosial adaptif. Data terpadu, mekanisme pemutakhiran cepat, pembayaran digital yang inklusif, dan program respons bencana atau shock harga harus terhubung.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Mendorong UMKM berbasis produktivitas. Dukungan tidak berhenti pada kredit, tetapi mencakup pasar, standar mutu, teknologi, manajemen kas, desain produk, data, dan rantai pasok.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Mengendalikan risiko utang rumah tangga. Transparansi APR/biaya total, literasi, batas praktik eksploitatif, dan sistem penilaian kemampuan bayar perlu diperkuat.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Menggunakan layanan publik sebagai social wage. Pendidikan, kesehatan, air, transportasi, dan perumahan yang lebih baik memperbesar pendapatan disposabel efektif.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Membangun dashboard daya beli. Indikator nasional dan regional harus menggabungkan harga, upah, konsumsi, pekerjaan, kredit, keyakinan konsumen, dan kerentanan sosial.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Melakukan distributional impact assessment. Reformasi pajak, subsidi, tarif, dan regulasi besar perlu diuji dampaknya menurut desil pendapatan, wilayah, dan tipe rumah tangga.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

Membangun budaya etika ekonomi. Pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan konsumen perlu menegakkan kejujuran, disiplin, anti-eksploitasi, serta tanggung jawab pengelolaan sumber daya.

Secara operasional, prioritas ini memerlukan target tahunan, pemilik program, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi lintas lembaga. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah biaya hidup menjadi lebih terkendali, pendapatan riil meningkat, kerentanan terhadap shock menurun, dan rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk menabung serta membiayai pengembangan manusia.

23. Ilustrasi Kasus: Bagaimana Daya Beli Bekerja dalam Kehidupan Nyata

Kasus A: Keluarga pekerja kota

Bayangkan sebuah keluarga dengan dua anak yang mengandalkan satu pendapatan tetap dan satu pendapatan tidak tetap. Ketika harga pangan, sewa, ongkos sekolah, dan transportasi naik bersama-sama, keluarga ini dapat tetap berada di atas garis kemiskinan tetapi kehilangan kemampuan menabung. Mereka

mulai menunda pemeriksaan kesehatan, mengurangi kualitas protein, menggunakan paylater, atau mengurangi kegiatan pendidikan tambahan. Secara statistik mereka masih bekerja dan masih mengonsumsi, tetapi kualitas daya belinya menurun. Kebijakan yang paling membantu bukan satu instrumen tunggal, melainkan kombinasi transportasi publik yang terjangkau, sekolah berkualitas, inflasi pangan terkendali, jaminan kesehatan efektif, dan peluang kenaikan pendapatan.

Pelajaran manajerial dari ilustrasi ini adalah bahwa rumah tangga bukan unit pasif. Mereka menyesuaikan pola makan, jam kerja, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan utang ketika menghadapi tekanan. Karena itu kebijakan yang hanya melihat rata-rata dapat kehilangan perubahan perilaku yang mendahului masalah makro yang lebih besar. Early warning sebaiknya menangkap perubahan komposisi konsumsi dan strategi bertahan rumah tangga.

Kasus B: Warung dan ekonomi lingkungan

Sebuah warung kecil hidup dari pengeluaran harian puluhan keluarga di sekitarnya. Ketika pelanggan mengurangi belanja lima atau sepuluh ribu rupiah per hari, dampaknya terakumulasi menjadi penurunan omzet yang signifikan. Pemilik warung kemudian mengurangi stok, menunda perbaikan, atau mengurangi jam kerja pembantu. Contoh ini menunjukkan multiplier lokal. Bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dapat segera kembali beredar melalui warung, pasar, angkutan, dan pemasok lokal. Namun efek jangka panjang akan lebih besar jika warung juga mendapat akses pembayaran digital, pencatatan kas, pembelian grosir, dan kredit modal kerja yang sehat.

Pelajaran manajerial dari ilustrasi ini adalah bahwa rumah tangga bukan unit pasif. Mereka menyesuaikan pola makan, jam kerja, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan utang ketika menghadapi tekanan. Karena itu kebijakan yang hanya melihat rata-rata dapat kehilangan perubahan perilaku yang mendahului masalah makro yang lebih besar. Early warning sebaiknya menangkap perubahan komposisi konsumsi dan strategi bertahan rumah tangga.

Kasus C: Petani dan konsumen pangan

Kebijakan pangan sering menghadapi dilema antara harga yang cukup tinggi untuk memberi insentif kepada petani dan harga yang cukup rendah bagi konsumen. Menekan harga di tingkat petani dapat memperbaiki daya beli kota sesaat tetapi melemahkan produksi musim berikutnya. Sebaliknya, membiarkan rantai distribusi tidak efisien membuat konsumen membayar mahal tanpa petani menerima harga yang layak. Solusi yang lebih berkelanjutan ialah meningkatkan produktivitas, penyimpanan, akses pasar, transparansi harga, logistik, dan organisasi produsen sehingga spread dapat ditekan tanpa memindahkan beban kepada salah satu pihak.

Pelajaran manajerial dari ilustrasi ini adalah bahwa rumah tangga bukan unit pasif. Mereka menyesuaikan pola makan, jam kerja, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan utang ketika menghadapi tekanan. Karena itu kebijakan yang hanya melihat rata-rata dapat kehilangan perubahan perilaku yang mendahului masalah makro yang lebih besar. Early warning sebaiknya menangkap perubahan komposisi konsumsi dan strategi bertahan rumah tangga.

Kasus D: Pekerja digital dan kredit konsumsi

Pekerja muda di kota dapat memiliki pendapatan yang tampak cukup tetapi sangat fluktuatif. Akses mudah ke paylater membuat konsumsi lebih lancar pada bulan yang baik, namun beberapa kewajiban cicilan dapat menumpuk ketika order menurun. Pada titik itu, daya beli masa depan telah dipinjam untuk membiayai konsumsi masa kini. Literasi keuangan saja tidak cukup; desain produk, transparansi biaya,

penilaian kemampuan bayar, dan mekanisme restrukturisasi yang wajar juga diperlukan. Perspektif etika menuntut tanggung jawab dua arah: konsumen perlu disiplin, dan pemberi pinjaman tidak boleh mengeksploitasi bias perilaku.

Pelajaran manajerial dari ilustrasi ini adalah bahwa rumah tangga bukan unit pasif. Mereka menyesuaikan pola makan, jam kerja, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan utang ketika menghadapi tekanan. Karena itu kebijakan yang hanya melihat rata-rata dapat kehilangan perubahan perilaku yang mendahului masalah makro yang lebih besar. Early warning sebaiknya menangkap perubahan komposisi konsumsi dan strategi bertahan rumah tangga.

24. Penutup

Menempatkan daya beli sebagai jantung pemulihan ekonomi Indonesia berarti mengubah cara kita bertanya tentang keberhasilan pembangunan. Pertanyaan tidak berhenti pada seberapa cepat PDB tumbuh, berapa besar investasi masuk, atau berapa banyak proyek diselesaikan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah keluarga memiliki pendapatan yang cukup dan stabil, apakah harga kebutuhan dasar dapat dijangkau, apakah pekerjaan memberi prospek, apakah layanan publik mengurangi beban rumah tangga, dan apakah orang memiliki ruang untuk menabung serta merencanakan masa depan.

Data ekonomi Indonesia sampai pertengahan 2026 menunjukkan resiliensi yang patut dihargai. Pertumbuhan tetap kuat, inflasi secara agregat terkendali, pengangguran terbuka menurun, dan konsumsi rumah tangga menjadi penopang penting. Namun resiliensi agregat tidak menghapus kebutuhan untuk memperkuat kualitas pekerjaan, upah riil, kelas menengah, perlindungan sosial adaptif, serta stabilitas harga kebutuhan dasar. Pemulihan harus dinilai melalui distribusi manfaatnya.

Dari perspektif kebijakan, menjaga daya beli bukan berarti mempertahankan semua harga secara artifisial atau membagikan bantuan tanpa batas. Strategi yang matang menggabungkan stabilisasi jangka pendek dengan produktivitas jangka panjang. Transfer digunakan ketika rumah tangga terkena shock; investasi manusia dan penciptaan kerja digunakan untuk membangun kemandirian; regulasi memastikan pasar jujur; layanan publik memperbesar pendapatan disposabel efektif; dan manajemen fiskal menjaga agar seluruh sistem dapat dipertahankan.

Dari perspektif Alkitab, ekonomi adalah ruang tanggung jawab moral. Upah yang layak dan tepat waktu, timbangan yang jujur, perhatian terhadap orang miskin, pengelolaan cadangan pada masa kelimpahan, penghargaan terhadap kerja, dan penolakan terhadap eksploitasi membentuk prinsip yang relevan bagi ekonomi modern. Prinsip tersebut tidak menentukan satu formula teknis, tetapi memberi kompas bagi pilihan kebijakan.

Pada akhirnya, daya beli adalah indikator yang berwajah manusia. Ketika daya beli menguat secara sehat, bukan melalui utang berlebihan atau subsidi yang tidak berkelanjutan, keluarga memperoleh ruang untuk hidup dengan lebih bermartabat, perusahaan memperoleh pasar yang lebih kuat, pemerintah memperoleh basis penerimaan yang lebih stabil, dan masyarakat memperoleh kepercayaan yang lebih besar terhadap masa depan. Di sanalah pemulihan ekonomi berubah dari statistik menjadi pengalaman nyata kesejahteraan.

Glossarium

Daya beli (purchasing power): Kemampuan pendapatan atau kekayaan untuk memperoleh barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.

Pendapatan riil: Pendapatan nominal yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga.

Pendapatan disposabel: Pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga setelah pajak langsung dan setelah memperhitungkan transfer yang diterima.

Konsumsi rumah tangga: Pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan.

Marginal propensity to consume (MPC): Proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan konsumsi.

Inflasi: Kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan.

Inflasi inti: Komponen inflasi yang cenderung persisten setelah mengeluarkan unsur yang sangat bergejolak atau diatur.

Upah riil: Upah nominal yang disesuaikan dengan perubahan biaya hidup.

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; proporsi penganggur terhadap angkatan kerja.

Produktivitas tenaga kerja: Output yang dihasilkan per unit tenaga kerja atau jam kerja.

Social wage: Nilai manfaat layanan publik yang secara efektif mengurangi pengeluaran wajib rumah tangga.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem perlindungan sosial yang dapat diperluas atau disesuaikan dengan cepat ketika terjadi guncangan.

Automatic stabilizer: Mekanisme fiskal yang bekerja otomatis meredam siklus ekonomi, seperti pajak progresif dan tunjangan pengangguran.

Financial inclusion: Akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang aman, bermanfaat, dan terjangkau.

Over-indebtedness: Kondisi ketika beban utang melebihi kemampuan pembayaran yang sehat.

Precautionary saving: Tabungan berjaga-jaga untuk menghadapi ketidakpastian pendapatan atau pengeluaran.

Multiplier effect: Efek berantai pengeluaran awal terhadap pendapatan dan pengeluaran berikutnya dalam perekonomian.

UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Distributional impact assessment: Analisis untuk menilai bagaimana suatu kebijakan memengaruhi kelompok pendapatan, wilayah, atau kelompok sosial yang berbeda.

Keadilan distributif: Prinsip mengenai pembagian manfaat dan beban ekonomi secara adil.

Penatalayanan (stewardship): Prinsip pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk tujuan yang baik dan berkelanjutan.

Safety net: Program perlindungan minimum untuk mencegah rumah tangga jatuh ke kondisi sangat buruk.

Opportunity ladder: Rangkaian peluang yang memungkinkan seseorang meningkatkan keterampilan, produktivitas, pendapatan, dan status ekonomi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, May 6). Ekonomi Indonesia resilien dan tumbuh solid pada triwulan I-2026. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, August 3). Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, August 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,39 juta rupiah. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). Survei Konsumen Juli 2026: Keyakinan konsumen terjaga. Bank Indonesia.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 141–168. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141>
- Carroll, C. D., Slacalek, J., Tokuoka, K., & White, M. N. (2017). The distribution of wealth and the marginal propensity to consume. *Quantitative Economics*, 8(3), 977–1020. <https://doi.org/10.3982/QE694>
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553–1623. <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Deaton, A. (1992). *Understanding consumption*. Oxford University Press.
- Jappelli, T., & Pistaferri, L. (2014). Fiscal policy and MPC heterogeneity. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 6(4), 107–136. <https://doi.org/10.1257/mac.6.4.107>
- Kaplan, G., & Violante, G. L. (2014). A model of the consumption response to fiscal stimulus payments. *Econometrica*, 82(4), 1199–1239. <https://doi.org/10.3982/ECTA10528>
- Mian, A., Rao, K., & Sufi, A. (2013). Household balance sheets, consumption, and the economic slump. *Quarterly Journal of Economics*, 128(4), 1687–1726. <https://doi.org/10.1093/qje/qjt020>
- OECD. (2019). *Under pressure: The squeezed middle class*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/689afed1-en>
- OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Indonesia*. OECD Publishing.
- World Bank. (2025). *Indonesia Economic Prospects, June 2025: People-first housing—A roadmap from homes to jobs to prosperity*. World Bank.
- World Bank. (2025, December 17). *Indonesia’s economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank.

Catatan Penulis

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD. Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Profil ringkas penulis tersedia pada www.rudyc.com/cv.pdf.